

IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT : KETERSEDIAAN DAN DAYA AKSES WEBSITE PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI PAPUA

Muliadi Anangkota*

*Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Cenderawasih Jayapura
Email: anangkota@gmail.com

Abstrak : Artikel ini merupakan hasil penelitian tentang ketersediaan dan daya akses website resmi pemda kabupaten/kota di provinsi Papua dalam mendukung implementasi e-government. Permasalahan utama yang diteliti adalah tentang perkembangan implementasi penerapan e-government di Papua dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam penerapan e-government di Papua. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan primer, yaitu kajian terhadap literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. Sedangkan Data primer yang digunakan berasal dari hasil wawancara dengan informan stakeholder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literature, observasi website kabupaten/kota di Papua, dan wawancara dengan informan pihak Diskominfo provinsi Papua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, sebanyak 26 pemda kab/kota dari 29 kab/kota di provinsi Papua telah memiliki website resmi dengan domain go.id. dari ke 26 website tersebut semuanya sudah memenuhi indikator daya akses yaitu kehadiran, interaksi, transaksi dan transformasi. Beberapa kendala yang dihadapi oleh tiap pemda kab/kota di provinsi Papua dalam pengembangan e-government adalah faktor ketersediaan fasilitas penunjang internet dan faktor SDM yang fokus dalam upload konten website. Faktor ketidaktahuan masyarakat tentang keberadaan website resmi pemda, juga menjadi kendala dalam peningkatan pelayanan public melalui e-government.

Kata Kunci : Implementasi, E-Government, Ketersediaan, Daya Akses, Papua

Abstract: This article is the result of research on involving and accessing official access to district / city government offices in the Papua province in supporting the implementation of e-government. The main issues discussed are about the development of implementation of the implementation of e-government in Papua and what factors influence the implementation of e-government in Papua. This research is included in descriptive qualitative research. The data source used is secondary and primary data, namely the study of literature, articles, journals and sites on the internet relating to research conducted. While the primary data used comes from the results of interviews with informant stakeholders. Data collection is done through literature studies, district / city observation websites in Papua, and interviews with Diskominfo in Papua province. The results showed that, as many as 26 district / municipal governments from 29 districts / cities in Papua province had official sites with the go.id domain. Of the 26 web sites all have met indicators, namely access, interaction, transaction and transformation. Several challenges issued by each district / city government in Papua in the development of e-government are factors that support internet support facilities and HR factors that focus on uploading website content. The factor of ignorance of the community about the approval of the official local government site, is also a priority in improving public services through e-government.

Keywords: Implementation, E-Government, Distribution, Power of Access, Papua

PENDAHULUAN

Dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan e-government, yang diikuti dengan Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan e-government Lembaga dari Kementerian Kominfo, maka sejak saat itu Pemerintah Republik Indonesia secara resmi mulai menerapkan e-government. Berdasarkan data dari situs web Kementerian Kominfo, diketahui bahwa dari 32 Propinsi yang membawahi 439 Pemerintah Kabupaten/ Kota, terdapat 225 Situs Web Pemda (48% dari total Pemda) dan yang aktif sebanyak 200 Situs (89% dari Total Situs).

Mengingat Inpres No 3 tahun 2003 dikeluarkan pada bulan Juni 2003 dan Panduan dari Kementerian Kominfo baru diterbitkan pada bulan Desember 2003, maka angka-angka diatas (yang disurvei pada

bulan Januari tahun 2004) merupakan hasil penilaian terhadap situs web Pemda yang kebanyakan dibangun sebelum dikeluarkannya Inpres No 3 tahun 2003. Hal ini bisa jadi merupakan indikasi bahwa sejak awal telah ada semangat dari sejumlah Pemerintah Daerah untuk mendukung pengembangan e-government di Indonesia.

Beberapa hasil penelitian tentang implementasi e-government menjadi perhatian menarik untuk didiskusikan secara ilmiah. Hasil Penelitian oleh Herman & Silfianti (2011) bertujuan untuk mengevaluasi kinerja pelayanan publik melalui Situs Web pemerintah di Indonesia. Variabel penelitiannya adalah karakteristik dari layanan web, popularitas Situs Web, dan web metrik. Data sekunder dan primer dikerahkan untuk mengukur variabel tersebut. Analisis data difokuskan pada mengidentifikasi pandangan kesenjangan digital dari tingkat pemerintahan dan lokasi geografis Jawa dan luar Jawa.

Hasil temuan menunjukkan bahwa diluar Jawa Situs Web provinsi lebih dominan daripada Situs Web kota atau kabupaten, sedangkan untuk Pulau Jawa, Situs Web kabupaten atau kota ini lebih dominan daripada web provinsi. Selanjutnya hal itu menunjukkan bahwa luar Jawa provinsi ini lebih baik dari kabupaten dan kota untuk halaman dan konten web-nya, sementara dipulau jawa kota dan kabupaten ini lebih baik dan populer. Penelitian ini menunjukkan juga bahwa ada kesenjangan digital antara Jawa dan luar Jawa untuk halaman web, inbound link dan lalu lintas.

Saat ini di Papua, e-government sudah diterapkan di kabupaten dan kota. Berbagai bentuk e-government telah dipraktekkan pada tiap organisasi perangkat daerah (OPD) baik yang vertikal maupun yang horizontal. Terdapat 29 Kabupaten/kota di Papua. Namun hingga saat ini belum ada data secara khusus mengenai ketersediaan e-government berbasis website tiap kabupaten/kota. Di sisi lain, seringkali Papua diidentikkan dengan ketertinggalan teknologi dan informasi akaibat dari minimnya sarana dan prasarana jaringan internet. Selama ini masalah ketiadaan fasilitas internet masih menjadi alasan utama masyarakat belum maksimal mengakses informasi pelayanan berbasis e-government tersebut.

Kebutuhan peningkatan pelayanan yang maksimal, cepat, mudah dan murah menjadi hal utama masyarakat di Papua. Salah satunya adalah dengan aplikasi e-government. Kemajuan teknologi yang sangat pesat tersebut, turut mempengaruhi pemerintah daerah di Papua untuk menerapkan e-government. Sehingga tidak heran kalau berbagai inovasi aplikasi e-government dikembangkan oleh pemerintah provinsi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini meneliti ketersediaan e-government berbasis website di tiap kabupaten dan kota di Papua. Selain itu juga tentang daya akses masyarakat terhadap website pemerintahan daerah di kabupaten/kota di Papua. Untuk melengkapi gagasan konstruktif bagi penerapan implementasi e-government maka dalam pembahasan ini dilengkapi juga dengan kajian faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi e-government. Oleh karena sangat diharapkan hasil penelitian dapat memberikan data dan penjelasan terkait perkembangan penerapan e-government di tiap kabupaten dan kota di provinsi Papua.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Dengan kata lain penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh

informasi-informasi mengenai keadaan yang ada (Mardalis, 1999: 26).

Penelitian kualitatif deskriptif dalam konteks penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan ketersediaan website pemerintah di daerah pada tiap kabupaten dan kota di provinsi Papua, dan daya akses masyarakat terhadap website pemerintah daerah.

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, yaitu kajian terhadap literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan (Sugiyono, 2009). Semuanya diakses atau kumpulan melalui internet dan buku-buku tentang e-government. dan metode penelitian. Lebih khusus untuk pembahasan dilakukan kajian terhadap konten situs web dari semua kota yang menjadi objek dalam penelitian ini. Sedangkan Data primer yang digunakan berasal dari hasil wawancara dengan informan stakeholder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, observasi website kabupaten/kota di Papua, wawancara dengan informan pihak diskominfo provinsi Papua.

HASIL PENELITIAN

Ketersediaan Website Pemda

Data yang ditampilkan pada hasil penelitian ini adalah berdasarkan pengambilan data secara sekunder penelusuran laman website masing masing pemda kabupaten/kota yang ada di provinsi melalui mesin pencari alamat website yaitu google.co.id. Berdasarkan data penelusuran tersebut maka ditemukan website masing masing pemda kab/kota di Provinsi Papua seperti pada tabel 1.

Pada Tabel 1 tersebut, terlihat bahwa seluruh pemda Kabupaten/Kota di provinsi Papua yang berjumlah 29 pemerintah daerah telah memiliki website resmi dan telah menggunakan domain resmi pemerintah yaitu go.id. Namun, untuk status keaktifannya ditampilkan pada data akses.

Daya Akses Website Pemda

Hasil pengumpulan data melalui pengecekan daya akses pada tiap website pemda kab/kota di provinsi Papua, menggunakan indicator daya akses yang terdiri dari kehadiran, interaksi, transaksi dan transformasi (Gupta, 2004:58). Data yang didapatkan ditampilkan pada tabel 2.

Berdasarkan tabel 2, terlihat bahwa sebanyak 26 Pemda Kab/kota di Provinsi Papua telah memiliki website yang dapat diakses. Sedangkan 3 Pemda yaitu kabupaten Nduga, Intan Jaya dan Mappi belum memiliki website yang dapat diakses namun sudah memiliki domain lembaga pemerintah yaitu go.id.

Tabel 1. Daftar Laman Website Pemda Kab/Kota di Provinsi Papua

No	Kab/Kota	Laman Website
1	Kabupaten Merauke	<i>merauke.go.id</i>
2	Kabupaten Jayawijaya	<i>jayawijayakab.go.id</i>
3	Kabupaten Jayapura	<i>jayapurakab.go.id</i>
4	Kabupaten Nabire	<i>nabirekab.go.id</i>
5	Kabupaten Kepulauan Yapen	<i>kepyapenkab.go.id</i>
6	Kabupaten Biak Numfor	<i>biakkab.go.id</i>
7	Kabupaten Puncak Jaya	<i>puncakjayakab.go.id</i>
8	Kabupaten Paniai	<i>paniai.go.id</i>
9	Kabupaten Mimika	<i>mimikakab.go.id</i>
10	Kabupaten Sarmi	<i>sarmikab.go.id</i>
11	Kabupaten Keerom	<i>keeromkab.go.id</i>
12	Kabupaten Pegunungan Bintang	<i>pegbintangkab.go.id</i>
13	Kabupaten Yahukimo	<i>yahukimokab.go.id</i>
14	Kabupaten Tolikara	<i>tolikarakab.go.id</i>
15	Kabupaten Waropen	<i>waropenkab.go.id</i>
16	Kabupaten Boven Digoel	<i>bovendigoelkab.go.id</i>
17	Kabupaten Mappi	<i>mappikab.go.id</i>
18	Kabupaten Asmat	<i>asmatkab.go.id</i>
19	Kabupaten Supiori	<i>supiorikab.go.id</i>
20	Kabupaten Mamberamo Raya	<i>mamberamorayakab.go.id</i>
21	Kabupaten Mamberamo Tengah	<i>mamberamotengahkab.go.id</i>
22	Kabupaten Yalimo	<i>yalimokab.go.id</i>
23	Kabupaten Lanny Jaya	<i>lannyjayakab.go.id</i>
24	Kabupaten Nduga	<i>ndugakab.go.id</i>
25	Kabupaten Puncak	<i>puncakkab.go.id</i>
26	Kabupaten Dogiyai	<i>dogiyaikab.go.id</i>
27	Kabupaten Intan Jaya	<i>intanjayakab.go.id</i>
28	Kabupaten Deiyai	<i>deiyaikab.go.id</i>
29	Kota Jayapura	<i>jayapurakota.go.id</i>

Sumber : data olahan sekunder, *google.co.id*, September – Oktober 2018

PEMBAHASAN

Untuk menganalisa data, maka digunakan indikator yang dikemukakan oleh Gartner Research (Gupta, 2004:58) dengan model The Value Chain Of E-Service, yang menetapkan empat tahap secara khusus untuk dikembangkan dalam konteks *e-governance*. Keempat fase tersebut yaitu : kehadiran, interaksi, transaksi dan transformasi.

Kehadiran

Pada indikator ini yang dikaji adalah apakah pemda kab/kota di Papua telah memunculkan Situs Web daerah di internet. Dalam tahap ini, informasi dasar

yang dibutuhkan masyarakat ditampilkan dalam Situs Web pemerintah. Berdasarkan hasil data seperti pada tabel 1 dan 2 maka, dapat dikatakan bahwa sebanyak 26 Pemda kab/kota di Papua telah memiliki situs resmi dengan menggunakan domain *go.id*. Dengan demikian untuk implementasi *e-government* berbasis website telah diimplementasikan di ke 26 Pemda tersebut.

Interaksi

Pada indikator ini yang dianalisa adalah konten/ isi web pemda yang menyediakan fasilitas interaksi antara masyarakat dan Pemerintah Daerah. Dalam tahap ini, informasi yang ditampilkan lebih bervariasi,

Tabel 2. Daya Akses tiap Website Pemda Kab/Kota di Provinsi Papua

No	Pemerintah Kabupaten/ Kota	Alamat Website	Indikator Daya Akses			
			Kehadiran	Interaksi	Transaksi	Transformasi
1	Merauke	<i>merauke.go.id</i>	Ya	Ya	Ya	Ya
2	Jayawijaya	<i>jayawijayakab.go.id</i>	Ya	Ya	Ya	Ya
3	Kab. Jayapura	<i>jayapurakab.go.id</i>	Ya	Ya	Ya	Ya
4	Nabire	<i>nabirekab.go.id</i>	Ya	Ya	Ya	Ya
5	Kepulauan Yapen	<i>kepyapenkab.go.id</i>	Ya	Ya	Ya	Ya
6	Biak Numfor	<i>biakkab.go.id</i>	Ya	Ya	Ya	Ya
7	Puncak Jaya	<i>puncakjayakab.go.id</i>	Iya	Iya	Iya	Iya
8	Paniai	<i>paniai.go.id</i>	Iya	Iya	Iya	Iya
9	Mimika	<i>mimikakab.go.id</i>	Ya	Ya	Ya	Ya
10	Sarmi	<i>sarmikab.go.id</i>	Ya	Ya	Ya	Ya
11	Keerom	<i>keeromkab.go.id</i>	Ya	Ya	Ya	Ya
12	Pegunungan Bintang	<i>pegbintangkab.go.id</i>	Iya	Iya	Iya	Iya
13	Yahukimo	<i>yahukimokab.go.id</i>	Iya	Iya	Iya	Iya
14	Tolikara	<i>tolikarakab.go.id</i>	Ya	Ya	Ya	Ya
15	Waropen	<i>waropenkab.go.id</i>	Iya	Iya	Iya	Iya
16	Boven Digoel	<i>bovendigoelkab.go.id</i>	Iya	Iya	Iya	Iya
17	Mappi	<i>mappikab.go.id</i>	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
18	Asmat	<i>asmatkab.go.id</i>	Ya	Ya	Ya	Ya
19	Supiori	<i>supiorikab.go.id</i>	Ya	Ya	Ya	Ya
20	Mamberamo Raya	<i>mamberamorayakab.go.id</i>	Ya	Ya	Ya	Ya
21	Mamberamo Tengah	<i>mamberamotengahkab.go.id</i>	Ya	Ya	Ya	Ya
22	Yalimo	<i>yalimokab.go.id</i>	Ya	Ya	Ya	Ya
23	Lanny Jaya	<i>lannyjayakab.go.id</i>	Ya	Ya	Ya	Ya
24	Nduga	<i>ndugakab.go.id</i>	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
25	Puncak	<i>puncakkab.go.id</i>	Ya	Ya	Ya	Ya
26	Dogiyai	<i>dogiyaikab.go.id</i>	Ya	Ya	Tidak	Tidak
27	Intan Jaya	<i>intanjayakab.go.id</i>	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
28	Deiyai	<i>deiyaikab.go.id</i>	Ya	Ya	Ya	Ya
29	Kota Jayapura	<i>jayapurakota.go.id</i>	Ya	Ya	Ya	Ya

Sumber : Data Olahan Oktober 2018

seperti fasilitas download dan komunikasi E-mail dalam Situs Web pemerintah. Berdasarkan tabel 2, dapat dikatakan bahwa seluruh website pemda kab/kota di provinsi Papua yang telah aktif dan dapat diakses telah memiliki fasilitas download dan komunikasi email.

Transaksi

Indikator transaksi menghendaki bahwa web pemda daerah daerah yang selain memiliki fasilitas interaksi juga dilengkapi dengan fasilitas transaksi pelayanan publik dari pemerintah. Sesuai dengan Tabel 2, maka dapat dikatakan bahwa website

pemda kab/kota di provinsi Papua yang telah aktif dan dapat diakses telah dilengkapi dengan fasilitas transaksi pelayanan publik.

Transformasi

Pada indikator transformasi, yang dianalisa adalah mengenai pelayanan pemerintah meningkat secara terintegrasi melalui keberadaan website pemerintah. Berdasarkan tabel 2, maka pemda kab/kota di provinsi Papua yang telah memiliki situs resmi dan dapat diakses telah mengalami peningkatan pelayanan dengan adanya situs resmi pemda.

Implementasi E- Government di Papua

Dalam prakteknya, Papua sudah menerapkan sistem pelayanan publik berbasis online melalui website *papua.go.id*. apa yang sudah diterapkan oleh pemerintah provinsi Papua tersebut adalah sejalan dengan definisi *e-government* seperti yang didefinisikan oleh UNDP (United Nation Development Program) mendefinisikan *eGovernment* secara lebih sederhana, yaitu “*eGovernment is the application of Information and Communication Technology (ICT) by government agencies*” (World Bank dalam Indrajit, 2002: 2). Artinya memang keberadaan IT sudah langsung diterapkan oleh pemerintah provinsi Papua pada penyelenggaraan pemerintahan di Papua selama ini. Pada website pemerintah daerah yang terdapat di seluruh kabupaten/kota di Papua juga telah memenuhi indikator penelitian yaitu kehadiran, interaksi, transaksi dan transformasi.

Situasi ini turut pula diikuti oleh 29 pemda kab/kota di provinsi Papua melalui memiliki website resmi pemerintah daerah dengan menggunakan *domain go.id*. Selain itu masih banyak variabel yang digunakan baik untuk mengevaluasi *eGovernment* secara keseluruhan maupun secara khusus, misalnya evaluasi tentang kualitas situs *eGovernment*, yaitu: audience, content, interactivity, usability dan innovation (Indrajit, 2006:53). Oleh karena itu keberadaan website pemerintah Papua mestinya harus dioptimalkan oleh seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka implementasi *e-government* di provinsi Papua.

Faktor-Faktor Penghambat

Dalam mengimplementasikan *e-government* melalui keberadaan website resmi pemda kab/kota tersebut, terdapat beberapa kendala atau faktor penghambat yaitu Pihak Pembuat Website, Ketersediaan Tenaga IT, Ketersediaan Fasilitas Penunjang dan Persepsi Masyarakat.

Pihak Pembuat Website

Masih terdapatnya pemda kab/kota di Papua yang membuat website resmi daerah dengan menggunakan pihak ke tiga, akibatnya ketergantungan upload data masih tergantung pada pihak ketiga tersebut.

Ketersediaan Tenaga IT

Tenaga SDM IT yang belum lengkap di miliki oleh tiap Pemda Kab/Kota, mengakibatkan tiap Diskominfo masih menggunakan tenaga luar (Non PNS) dalam membantu memelihara keberlangsungan website daerah

Ketersediaan Fasilitas Penunjang

Keadaan geografis Papua yang cukup sulit dijangkau dengan jaringan internet yang stabil membuat eksistensi website sering terganggu. Selain itu juga ketersediaan sarana pemeliharaan website berbasis hardware server yang terbatas membuat daya tahan server juga terganggu.

Persepsi Masyarakat

Masyarakat belum terlalu mengetahui tentang adanya website resmi pemda daerah, sehingga penggunaan fasilitas pelayanan publik berbasis online masih rendah atau minim.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut.

Kesimpulan

Pemda kab/kota di provinsi Papua yang telah memiliki website resmi pemerintah daerah sebanyak 26 pemda kab/kota. Sedangkan 3 Pemda Kab/kota belum memiliki website yang dapat diakses namun sudah memiliki domain kelembagaan pemerintah berbasis *domain go.id*. kedua, daya akses tiap website resmi tersebut telah memenuhi indikator daya akses yaitu, kehadiran, interaksi, transaksi dan transformasi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi *e-government* di Papua adalah Pihak Pembuat Website, Ketersediaan Tenaga IT, Ketersediaan Fasilitas Penunjang dan Persepsi Masyarakat

Saran

Diharapkan pemda kabupaten/kota di provinsi Papua yang belum memiliki situs resmi agar segera diupayakan untuk dapat diakses oleh masyarakat. Selain itu juga pemda kabupaten/kota di provinsi Papua yang sudah memiliki website resmi dan dapat diakses agar meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat setempat tentang keberadaan website resmi daerah sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan website tersebut untuk mendapatkan informasi pelayanan publik secara online.

DAFTAR PUSTAKA

Hermana, B., & Silfianti, W. 2011. *Evaluating e-government implementation by local government: digital divide in internet based public services in Indonesia*. International Journal of Business and Social Science, 2(3), 156-163

- Indrajit, Richardus Eko. 2002. *Membangun Aplikasi e-government*. Yogyakarta: Andi.
- Indrajit, Richardus Eko. 2006. *Electronic Government*. Yogyakarta: Andi
- Mardalis, 1999. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara
- Peraturan :
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan e-government
- Internet :
<http://www.Papua.go.id/> diakses dari bulan September – Oktober 2018
<http://merauke.go.id/> diakses dari bulan September – Oktober 2018
<http://jayawijayakab.go.id/> diakses dari bulan September – Oktober 2018
<http://jayapurakab.go.id/> diakses dari bulan September – Oktober 2018
<http://nabirekab.go.id/> diakses dari bulan September – Oktober 2018
<http://kepyapenkab.go.id/> diakses dari bulan September – Oktober 2018
<http://biakkab.go.id/> diakses dari bulan September – Oktober 2018
<http://puncakjayakab.go.id/> diakses dari bulan September – Oktober 2018
<http://paniai.go.id/> diakses dari bulan September – Oktober 2018
<http://mimikakab.go.id/> diakses dari bulan September – Oktober 2018
<http://sarmikab.go.id/> diakses dari bulan September – Oktober 2018
<http://keeromkab.go.id/> diakses dari bulan September – Oktober 2018
<http://pegbintangkab.go.id/> diakses dari bulan September – Oktober 2018
<http://yahukimokab.go.id/> diakses dari bulan September – Oktober 2018
<http://tolikarakab.go.id/> diakses dari bulan September – Oktober 2018
<http://waropenkab.go.id/> diakses dari bulan September – Oktober 2018
<http://bovendigoelkab.go.id/> diakses dari bulan September – Oktober 2018
<http://mappikab.go.id/> diakses dari bulan September – Oktober 2018
<http://asmatkab.go.id/> diakses dari bulan September – Oktober 2018
<http://supiorikab.go.id/> diakses dari bulan September – Oktober 2018
<http://mamberamorayakab.go.id/> diakses dari bulan September – Oktober 2018
<http://mamberamotengahkab.go.id/> diakses dari bulan September – Oktober 2018
<http://yalimokab.go.id/> diakses dari bulan September – Oktober 2018
<http://lannyjayakab.go.id/> diakses dari bulan September – Oktober 2018
<http://ndugakab.go.id/> diakses dari bulan September – Oktober 2018
<http://puncakkab.go.id/> diakses dari bulan September – Oktober 2018
<http://dogiyaikab.go.id/> diakses dari bulan September – Oktober 2018
<http://intanjayakab.go.id/> diakses dari bulan September – Oktober 2018
<http://deiyaikab.go.id/> diakses dari bulan September – Oktober 2018
<http://jayapurakota.go.id/> diakses dari bulan September – Oktober 2018